**Laporan Pengawasan DPR RI**

Rapat Panja - Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah.

Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RAPBN TA 2022.

Hari : Rabu, 9 Juni 2021

Dibuat oleh :

Agenda : Pembahasan Asumsi Dasar Kebijakan Fiskal Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RAPBN TA 2022

Narasumber : Kementerian Keuangan, Fraksi PAN, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra, Kementerian ESDM, Fraksi PKB, dan Fraksi PKS

Referensi : <https://www.youtube.com/watch?v=GaM3xr7QI6o&t=10903s>

**Fraksi:**

* **Eko Hendro Purnomo, S. Sos, (No. Anggota 493 - Dapil DKI Jakarta 1)**
* Fraksi PAN
* Pendapat:

Sama dengan PDIP, namun pemerintah perlu mewaspadai proses instansi tinggi atau hiperinflasi yang datang bersama pemulihan ekonomi yang cepat.

**Narasumber:**

* **Febri (Kementerian Keuangan)**
* Pendapat:

1. Kami berterima kasih sekali untuk kesempatan yang diberikan terkait dengan asumsi makro yang kita sudah bahas memang benar pak ketua seperti yang disampaikan pak Dolfie pada komisi XI.
2. Pemerintahan maju dengan 13.900-15.000 lalu dengan diskusi kita bisa sedikit lebih optimis jika batas atasnya ada di angka 14.800 tingkat suku bunga SUN 10 tahun ini juga dalam *range* jangkanya dan ini kita pegang sesuai dengan pembahasan pemerintah dan komisi XI.

* Hal mendesak:

1. Antisipasi dengan segala yang dilakukan pemerintah, relatif membuat kita cukup bisa mengendalikan sejauh ini.
2. Terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita harus memiliki bahasa yang lebih terfokus, karena jika kita terfokus juga dapat menghasilkan pembahasan yang lebih kuat.

* Usulan atau Saran: Kami mengusulkan untuk pertumbuhan ini tetap dalam bentuk *range* kalau tadi diusulkan 5,4 - 5,5, menurut kami ini masih dalam range yang kami usulkan memang ini lebih sempit *range*-nya. Akan tetapi ketidakpastian itu tetap kita gambarkan walaupun kita ingin lebih fokus, jadi kami lebih menghargai dan menerima *range* 5,4 – 5,5.

**Pimpinan Banggar:**

* **MH. Said Abdullah, (No. Anggota 224 – Dapil Jatim XI)**
* Fraksi PDI-P
* Pendapat:

Pertumbuhan ekonomi 5.4-5.5, inflasi nilai tukar 13.900 – 14.800, suku bunga 10 tahun kita 6,32-7,27, target pembangunan tidak ada yang berubah.

* Sikap : Ketuk Palu

**Fraksi:**

* **Dolfie O.F.P, (No. Anggota 187 – Dapil Jateng IV)**
* Fraksi PDI-P
* Pendapat:

Terkait dengan kesepakatan yang sudah diambil mengenai pertumbuhan ekonomi, kami ingin masukan catatan dari komisi XI terkait pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

* Usulan atau saran:

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dalam *range* 5,4-5,5 maka dibutuhkan upaya kebijakan dan program pemerintah baik itu dari sisi pengeluaran, produksi, maupun program pembangunan regional untuk mendorong sasaran yang ingin dicapai. Jadi kami usulkan catatannya melekat

**Pimpinan Banggar:**

* **MH. Said Abdullah, (No. Anggota 224 – Dapil Jatim XI)**
* Fraksi PDI-P
* Pendapat:

1. Mengoptimalkan penguatan nilai tukar rupiah
2. Cadangan nilai devisa yang meningkat untuk dapat menjaga stabilitas nilai rupiah yang berkelanjutan sesuai dengan nilai fundamentalnya.
3. Kebijakan fiskal yang terjadi pada tahun 2022 juga perlu didukung dengan kebijakan pengembalian inflasi agar dapat memenuhi target 2.0 – 4%, yang kita ambil tengahnya 3%.
4. Ini menyikap kita semua, yang menjadi kesatuan dari kesimpulan yang saya baca tadi.

**Narasumber:**

* **Febri (Kementerian Keuangan RI)**
* Hal mendesak:

kita ingin mencerminkan masih tingginya ketidakpastian jadi mohon dalam kesimpulannya juga kita dapat cerminkan kalimat bahwa kita menyadari hal yang tidak pasti.

REKAMAN TIDAK ADA SUARA DARI 17:51 HINGGA 18:41

MENAMPILKAN POWER POINT PADA MENIT KE 19:30

**Narasumber:**

* **Febri (Kementerian Keuangan RI)**
* Pendapat:

1. Kebijakan penerimaan migas 2022:
2. Meningkatkan *lifting* migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu Migas, dengan peningkatan dan perluasan kebijakan pelayanan satu pintu, transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi, mempercepat *Chemical Enhanced Oil Recovery (EOR)*, serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar *(Giant Discovery).*
3. Mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas, antara lain melalui skema bagi hasil pengusahaan hulu migas yang saat ini didorong agar pelaku usaha dapat menjalankan usahanya secara efektif dan efisien.
4. Menyempurnakan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian.
5. Meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, dan transparansi pemanfaatan serta penggalian potensi melalui pemanfaatan teknologi.
6. Menerapkan kebijakan penetapan harga gas bumi tertentu, melalui paket kebijakan stimulus ekonomi untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga Gas Bumi.
7. Strategi dan kebijakan teknis optimalisasi hulu migas:
8. Mempertahankan tingkat produksi eksisting
9. Mempercepat pelaksanaan EOR
10. Melakukan survey seismik secara masif
11. Eksplorasi masif penemuan (Giant Production)
12. Tahun 2022 angka sementara untuk PDB nominal subsector ada di angka 332,6 Triliun.
13. Penerimaan migas terdiri atas PNBP migas 65% dan PPH migas 35% ini juga mengikuti fluktuasi dari harga penerimaan migas cenderung fluktuatif dan pertumbuhan rata-ratanya pada periode 2016 – 2017 adalah 16,9%.
14. Tahun 2020 penerimaan migas turun 44,9% dampak terbesarnya dari COVID-19 yang membuat permintaan minyak dunia anjlok, sehingga menekan harga minyak tersebut. Realisasi sampai dengan april 2021 mencapai 38,8 Triliun ini adalah 32% dari APBN 2021.

**Fraksi:**

* **Maman Abdurrahman, S.T, (No. Anggota 332 – Dapil Kalimantan Barat I)**
* Fraksi Partai Golkar
* Pendapat:

Secara prinsip kita dapat memahami yang dijelaskan oleh pemerintah namun terkait asumsi makro di komisi VII masih berproses.

* Sikap:

Menunggu untuk pembahasan lebih lanjut di komisi.

**Fraksi:**

* **Moreno Soeprapto (No. Anggota 110 – Dapil Jatim V)**
* Fraksi Partai Gerindra
* Pendapat:

Saya menghargai dari masukan dari pemerintah dari situasi yang mungkin saat ini dalam ketidakpastian tapi kita di Komisi VII memang sedang mendalami betul  bagaimana untuk meningkatkan lifting.

* Sikap:

APBN terbengkalai jadi kita Komisi VII akan segera merampungkan untuk lifting migas.

**Fraksi:**

* **(No. Anggota – Dapil )**
* Fraksi
* Pendapat:

1. Lifting Migas ini akan berimplikasi terhadap pengeluaran kita apa yang mau kita spend.
2. ESDM dan kementerian keuangan sudah sampaikan pada komisi VII sampaikan kembali tidak menutup kemungkinan berarti 3 tahun ke depan ini potensi Migas kita ketemu di angka 500 sampai 600.
3. Kita nggak akan mungkin ada ada itu tadi mama ya mengenai dari situ Apakah ada subtitusi solusi penerimaan negara dari sektor yang lain selain dari sektor Migas khususnya di SDM ini.
4. pemerintah sudah punya salah satu langkah untuk meningkatkan eksplorasi saya dan memahami bahwa tidak akan mungkin kita bisa meningkatkan produksi Kalau tidak ada temuan cadangan baru pemahaman saya itu kan sudah ada komitmen kerja pasti yang dijelaskan dalam forum itu temen-temen di bandara ini seperti apa komitmen kerja pasti untuk mendorong peningkatan eksplorasi dan temuan pandangan-pandangan baru lahir.
5. Kenaikan produksi di semua sektor bukan hanya di Migas pasti biaya pembuatan harus dinaikan hari ini kalau kita misalnya kita genjot produksi kita mau ketemu di angka maksimal misalnya pasti mau gak mau pengeluaran juga maksimal

* Pertanyaan:

Pertanyaan saya begini kepada kementerian keuangan dan juga teman-teman di banggar Apakah tidak ada usulan lain kita buat usulan asumsi tambahan terkait pendapatan negara kita selain Migas karena kalau misalnya kita sekarang hanya lifting migas  saja sedangkan dari tahun ke tahun turun dari mana lagi untuk menutup turunnya kita. Sedangkan pengeluaran kita kan kesananya naik terus kalau misalnya nih di Komisi I saja ada usulan baik kurang lebih hampir 1700 triliun walaupun itu baru ataupun segala macam gitu sedangkan penerima kita di sini aja terus dari segala macam ujung-ujungnya dalam dalam forum ini bisa dijelaskan oleh kementerian keuangan dan SDM Apakah ada solusi untuk melakukan substitusi pendapatan negara dari sektor migas yang dari tahun ke tahun turun mungkin itu bisa dijawab selain memang saya memahami bahwa ada karena pada akhirnya begini.

**Fraksi:**

* **(No. Anggota – Dapil )**
* Fraksi
* Pendapat:

1. Ini perlu diwacanakan lagi, pimpinan karena kami mengikuti waktu di komisi VII  juga di periode 2009-2014. Waktu itu performa lifting cukup baik memang ada kebijakan yang berubah di badan anggaran waktu itu, karena pada ujung sekitar 2013-2014 itu metode perhitungan *cost recovery* itu dimasukkan di APBN. Begitu masuk di APBN Mungkin memang kita lihat turunnya jadi cepat sekali kiranya Apakah bisa diwacanakan.
2. Lifting migas ini dianggap seperti sebelum 2014 bahwa cost recovery itu tidak dimasukkan APBN tetapi dari offside lifting dan cost recovery itu yang masuk menjadi PNBP apakah itu itu bisa ada probabilitas peningkatan pendapatan dari sektor Migas. Karena memang kalau misalkan *cost recovery* ini dihitung sebagai PNBP dan dimasukkan perhitungan spending APBN.

**Narasumber:**

* **(Kementerian RI)**
* Pendapat:

1. Transisi energi itu menjadi kebijakan besar.
2. Transisi energi yang kita lakukan ini bisa terjadi secara *smooth* dan juga memberikan kepastian bisnis juga bagi investor di sektor hulu migas.
3. Pada satu sisi kita memang melihat ladang yang semakin tua dan juga efisiensinya juga makin berkurang di sisi lain harga tetap fluktuatif sehingga ketidakpastian itu masih akan cukup tinggi. Nah disinilah peran kebijakan dalam konteks transisi tadi itu Pak bahwa kalau kita bicara transisi ke depan sisi energi terbarukan itu akan terus kita dorong dan ini sejalan dengan arahan pak presiden dan juga target kita komitmen kita untuk Paris Agreement dan bahkan kita sudah bicara tentang Net Zero Emission 2060.

**Narasumber:**

* **(Dirjen Migas)**
* Pendapat:

1. Ketertarikan investasi di Indonesia ini termasuk rendah dibandingkan negara lain seperti Vietnam dimana kita lebih rendah.
2. Penanaman modal di Indonesia masih lemah, jadi yang membuat investasi kita turun.
3. Kita harus memiliki eksplorasi yang bisa discovery yang besar dan resource yang bisa kita kembangkan. dua hal tersebut jika dapat dilaksanakan jika kurva turun tersebut dapat naik lagi.

* Pertanyaannya:

Seberapa besar KKP ini melaksanakan eksplorasi ?. khusus 10 tahun terakhir itu kebanyakan kontraktor tidak bisa dan kurang dari 50% yang dapat dilaksanakan, karena masalah finansial kontraktornya karena cukup panjang selama 30 tahun. yang kedua adalah teknis ketika melaksanakan eksplorasi yang ada kebijakan tumpang tindih. selanjutnya yang kedua adalah dari *resource to production* yang sudah di discovery maka harus dikembangkan, ada lebih dari 50 *claim of development* yang mangkrak permasalahan finansial.

**Fraksi:**

* **(No. Anggota – Dapil )**
* Fraksi
* Pertanyaan:

Sekarang pertanyaannya siapa yang menetapkan hal itu bisa mandek karena faktor kemampuan ? masa akan dibiarkan saja ?

**Narasumber:**

* **(Dirjen Migas)**
* Pendapat:

Untuk meningkatkan konsep discovery and production tadi ada kejadian diluar dugaan seperti SAL yang kehilangan partnernya. Padahal jika kita mengcover hal itu dan mengembalikannya kepada pemerintah maka hal tersebut akan cepat ditangani.

**Fraksi:**

* **(No. Anggota – Dapil )**
* Fraksi
* Pertanyaan:

Apakah ada kelemahan konseptual yang membuat kita susah untuk bergerak dan kita menjadi didikte oleh para kontraktor untuk tidak dapat melakukan apa-apa seperti skema cost recovery tersebut. karena hal ini sudah ada sejak jaman Orde Baru dimana mereka meletakkannya pada Deputi 5 dan jika permasalahannya pada kontraktor maka carikan yang baru dan segera untuk apa ditunda. Karena ini hanya permasalahan pada efisiensi.

**Fraksi:**

* **(No. Anggota – Dapil )**
* Fraksi
* Pendapat:

Jika kita ingin bicara sekarang ini untuk membahas APBN 2022 karena ini merupakan APBN yang strategis dan transisional dari sisi PERPU. Oleh karena itu kamu berkenan untuk meletakan kondisi fiscal kita di tengah ketidakpastian tadi.

**Fraksi:**

* **(No. Anggota – Dapil )**
* Fraksi
* Pendapat:

Perlu adanya setelah penjelasan dari pihak migas, dan saya ingin melihat ketidakpastian dari nasional hingga internasional. APBN 2022 ini menjadi titik tolak dari kita berhasil keluar dari krisis atau tidak, ini adalah batas apakah kita melampaui hutang kita 3% itu. Jika kita salah melakukan perhitungan pada hari ini dan 2022, namun harus hati-hati.

**Fraksi:**

* **Hj. RATNA JUWITA SARI, S.E., M.M.** **(No. Anggota 46 – Dapil Jatim IX)**
* Fraksi PKB
* Pendapat:

1. Kita ingin memacu agar bagaimana lifting ini naik dan bertahan seperti yang diharapkan SKK Migas 1jt barel per hari.
2. Yang perlu diingatkan adalah adalah mencari investor yang berani untuk mengejar target lifting. Tapi yang perlu dipertahankan adalah *sustainability development* jangan sampai tergadai hanya untuk mencapai target *lifting*.
3. Saya mencatat komitmen dari pak Febrio terkait bagaimana menjawab pertanyaan mas Maman untuk mengejar *lifting* ini dari mana jika migas selalu turun. Tadi pak Febrio telah menyatakan bahwa ini kesempatan kita untuk melaksanakan transisi energy untuk melakukan hal besar untuk itu.

**Fraksi:**

* **Perempuan (No. Anggota – Dapil )**
* Fraksi
* Pendapat:

1. Indikator pembangunan bahwa komisi 11 telah menetapkan adanya sedikit perbedaan, antara nilai tukar petani tidak sama persis seperti pemerintah komisi 11 menetapkan ada range 103 sampai dengan 105 ada kenaikan.
2. Pembicaraan awal setelah pidato presiden kita akan lebih mengerucut untuk menetapkan nilai tukar petani untuk kesepakatan angkanya yang dipakai yang mana, berikut juga NTN (nilai tukar nelayan) 104-106 jadi saya kira banggar walau sangat berbeda dengan komisi 11 tapi tetap sangat menghormati keputusan pak said sama seperti pemerintah.
3. Data BPS mengatakan terjadinya penurunan terhadap nilai tukar petani padahal didalam masa pandemi Covid-19 petani menjadi sektor yang sangat primadona saat kita menghadapi Covid-19 terkhusus banyaknya bantuan-bantuan sosial, sehingga kita mengoreksi adanya penyampaian dari BPS kadang gak masuk akal kalau melihat nilai tukar petani terjadi penurunan sangat tidak masuk akal karena kami tau secara kasat mata bahwa petani mengalami peningkatan cukup signifikan, saya juga melihat sendiri bahwa petani sangat sejahtera pada masa pandemi covid-19 tidak menghalangi gangguan ekonomi mereka seperti yang ada di perkotaan.

**Fraksi:**

* **H. ECKY AWAL MUCHARAM (No. Anggota 430 – Dapil Jabar III)**
* Fraksi PKS
* Pendapat:

1. Pertama terkait dengan laporan hasil pembahasan pada komisi 11 saya rasa sudah disampaikan ketika sudah disampaikan pada rapat kerja artinya pemerintah sudah sepakat dengan nilai tukar petani dengan nilai tukar nelayan.
2. Hemat kami sebaiknya mengurangi ketidakpastian sehingga perlunya pemerintah menghitung asumsi yang existing 10%, atau kebijakan terkait dengan kenaikan itu baru wacana.
3. Dalam kondisi saat ini dan tujuan pemerintah bukan semata-mata mengambil penerimaan negara melainkan mendorong rakyat untuk bisa beraktivitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh, perlu hati2 rencana wacana tersebut jangan dilemparkan atau di masukan pada pertimbangan asumsi makro 2022.

* Pertanyaan:

Apakah penerimaan negaranya menggunakan asumsi ppn yang eksisting 10% atau pemerintah sudah menghitung dengan rencana dinaikan 12% ?

menurut

**Narasumber:**

* **Febri (Kementerian Keuangan RI)**
* Pendapat:

1. Kebijakan subsidi (Pemerintah): (Paparan disampaikan PPT) kebijakan subsidi tahun 2022, ada 3 bagian 1. Urgensi reformasi subsidi energi, 2. Kebijakan subsidi BBM dan LPG yang 3 kg tahun 2022, 3. Kebijakan subsidi listrik tahun 2022. Terjadi permasalahan pada subsidi energi kita yang tidak tepat sasaran disisi lain beban subsidi terus meningkat. Pemerintah ingin mendapat dukungan DPR untuk bersama-sama memperbaiki permasalahan yang sudah hadapi ini cukup lama.
2. Kesimpulan panja A pembahasan RAPBN 2021:
3. Transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap.
4. Pelaksanaan transformasi dilakukan secara berhati-hati mempertimbangkan waktu yang tepat sesuai dengan kesiapan data dan infrastruktur serta perkembangan perekonomian pasca pandemi covid-19.
5. Kesimpulan RDP Banggar 7 april 2021
6. Kebijakan subsidi lpg 3kg diberikan secara tertutup dalam bentuk non tunai langsung kepada rumah tangga sasaran (KPM, usaha mikro, petani, & nelayan) yang berhak menerima subsidi sesuai dengan DIKS
7. Lpg dijual dengan harga keekonomian untuk menghilangkan disparitas harga di pasar dimulai paling lambat TA 2022
8. Kebijakan subsidi bbm dan lpg tabung 3 kg tahun 2022:
9. Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar
10. Transformasi subsidi LPG tabung 3 kg menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial.
11. Kebijakan subsidi listrik tahun 2022
12. Subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak,
13. Subsidi listrik untuk rt diberikan secara tepat sasaran bagi RT miskin dan rentan sesuai DTKS.
14. Transformasi subsidi listrik rumah tangga terintegrasi dengan program bansos, dilakukan secara bertahap.
15. Mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien

**Fraksi:**

* **Pak (No. Anggota – Dapil )**
* Fraksi
* Pendapat:

1. Berharap terkait subsidi nanti merupakan angka-angka yang bener kalau kita melihat langkahnya mencapai 40%
2. Subsidi tidak pernah sasaran inilah salah satu wujud daripada transformasi struktural yang dikemukakan oleh pemerintah yang dikemukakan dalam rapat.

**Fraksi:**

* **H. ECKY AWAL MUCHARAM (No. Anggota 430 – Dapil Jabar III)**
* Fraksi PKS
* Pendapat:

1. Akibat kebijakan harga tidak ada kenaikan dan ini dinikmati oleh industri besar sebanyak 8,3 triliun untuk 2020 kemudian rumah tangga 66,5 triliun dan bisnis besar 2,6 triliun

* Pertanyaan:

1. BBM dan subsidi gas elpiji itu belum dijelaskan disini akibat kompensasi itu bagaimana distribusi penerima manfaatnya.
2. Kompensasi BBM berapa triliun dan siapa saja penerima manfaatnya sehingga kita jelas kalau ada deviasi penerima manfaat dari target yang sesungguhnya itu siapa yang diuntungkan karena kompensasi ini berarti dan dinikmati oleh banyak pihak berbagai kelas masyarakat.
3. Tolong dijelaskan ketika kita mengetahui formulasi daripada masing-masing Siapa yang menerima manfaat akibat kompensasi ini maka kita menjadi tahu ya Apakah subsidi elpiji 3 kg atau perubahan metode pembangun metode pemberian subsidi LPG 3 kg tersebut adil atau tidak adil.

**Fraksi:**

* **Bu Mersi (No. Anggota 261 – Dapil Maluku )**
* Fraksi PDI-P
* Pendapat:

1. Subsidi energi dalam kecepatan pada saat pembahasan APBN tahun 2021 kita memang ada dalam semangat.
2. Berbicara tentang kebijakan energi supaya berkeadilan kita bicara kebijakan energi konvensional keadilan energi mestinya tidak ada batas lagi seperti di ujung Papua dengan di ujung barat Jakarta mesinnya membelai a dan z minimal dari pelayanan standar dasar pelayanan minimum ini harus bisa disediakan oleh negara bagaimanapun bentuknya.

* Pertanyaan:

Bagaimana mempertimbangkan dengan sangat sungguh-sungguh ruang fiskal anggaran kita yang sangat terbatas.

**Fraksi:**

* **(No. Anggota – Dapil )**
* Fraksi
* Pendapat:

1. Komisi I juga kita ingin memohon pada Perpres 39 2019 mengenai satu data Indonesia tadi kau disampaikan untuk membuat list distribusi tertutup itu masih menunggu dari data yang dibuat oleh tim satu data Indonesia yang kepalanya adalah menteri Bappenas.
2. Dalam proses rekonsiliasi kita melihatnya gampang-gampang saja disini 9,3 juta penerima Bansos 18,8 juta ya harusnya kan tidak terlalu susah untuk memetakan mana yang bisa dilakukan subsidi langsung jadi untuk percepatan penyelesaian satu data Indonesia yang dibuat dengan pharfest 2019.

**Fraksi:**

* **Maman Abdurrahman, S.T, (No. Anggota 332 – Dapil Kalimantan Barat I)**
* Fraksi Partai Golkar
* Pendapat:

1. Mendorong agar pemerintah serius untuk menyelesaikan permasalahan subsidi energi.
2. komisi VII mengenai isu subsidi energi ini betul-betul meminta kepada pemerintah bahwa jangan Gali Lobang Tutup Lobang Jangan sampai kita mencoba menyelesaikan permasalah subsidi energi ini dengan cara penggunaan dapat perhatian menimbulkan masalah baru jadi tolong segera diselesaikan terlebih dahulu permasalahan dapat tersebut.

**Pimpinan Banggar:**

* **MH. Said Abdullah, (No. Anggota 224 – Dapil Jatim XI)**
* Fraksi PDI-P
* Pendapat:

1. 40% masyarakat bawah yang berhak menerima subsidi itu hanya 26% yang menikmati, selebihnya bukan orang miskin yang menerima subsidi tersebut. orang miskin itu atau yang tidak mampu itu yang 26% yang benar menikmati itu hanya 68.000 sekian.
2. Bahkan tanggal 21 April kita rapat dengan pemerintah dan Dirjen Tenaga Listrik hadir,

Dirjen Migas hadir, Pertamina Hadir, Direktorat hadir, dan Dirjen Pertanian, disimpulkan bahwa :

1. Melanjutkan reformasi kebijakan subsidi listrik kepada pelanggan 450 VA kebijakan ini dilakukan dengan cara mencocokan data antara pelanggan listrik yang dimiliki oleh PLN dengan data terpadu yang dimiliki oleh dinas kesejahteraan sosial sebagaimana yang pernah dibahaskan pada APBN 2016.
2. Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang berhak, yaitu: bagi pelanggan 450 VA dan 940VA yang merupakan rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai dengan data BPKS yang diberikan kepada kelompok sosial keagamaan.
3. Kompensasi tidak lagi diberikan kepada PLN, non subsidi dimulai paling lambat tahun anggaran 2022.
4. Kebijakan subsidi LPG 3 Kg diberikan secara tertutup dalam bentuk non tunai langsung kepada rumah tangga sasaran (KPM, usaha mikro, petani dan nelayan) yang berhak menerima subsidi sesuai dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) LPG 3 Kg dijual dengan harga keekonomian untuk menghilangkan disparitas harga di pasar dimulai paling lambat tahun anggaran 2022.
5. Pembenahan kebijakan pengawalan subsidi pokok dilakukan dengan mengubah subsidi komunitas menjadi subsidi kepada pengguna, mekanisme penyaluran dilakukan dengan sesuai dengan DTKS anggaran tahun 2022 juga.
6. Metode penyaluran melalui sidik jari atau biometric wajah, sistem tersebut akan diintegrasikan dengan KTM yang sudah ada sehinga tidak perlu kartu-kartu yang diberikan kepada masyarakat kepada DTKS.

\*REKAMAN ERROR DARI 2:56:56 – 3:05:06\*

**Pimpinan Banggar:**

* **MH. Said Abdullah, (No. Anggota 224 – Dapil Jatim XI)**
* Fraksi PDI-P
* Pendapat:

1. Kita bisa menerima apa yang dilakukan pemerintah dengan catatan pemerintah memperhatikan betul kondisi sesuai masyarakat pada tataran kebijakan hingga nanti bulan September kita bahas.
2. Selalu diingatkan bahwa baik banggar maupun pemerintah tidak ada yang mau mencabut subsidi, justru subsidi itu akan dipertajam kepada orang yang sungguh-sungguh berhak. Bahkan jika Baleg, DTKS, Pertamina, PLN, sinkron bisa saja penerima subsidi 450 biasanya 65.000 bisa kita tetapkan menjadi 90.000.

\*KETUK PALU SKORSING RAPAT PADA MENIT KE 3:18:34\*